



## Evaluasi Pengaruh Ekonomi Pembangunan Program Pemerintah dalam Peningkatan Akses Pendidikan dan Penciptaan Lapangan Kerja

Aditia Saputra <sup>1\*</sup>, M. Fathir Farhat <sup>2</sup>, M. Hasbi Ansyari <sup>3</sup>, Fitrah Mirza <sup>4</sup>

<sup>1-4</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: [adit89541@gmail.com](mailto:adit89541@gmail.com) <sup>1\*</sup>, [muhammadfathifarhat0406@gmail.com](mailto:muhammadfathifarhat0406@gmail.com) <sup>2</sup>,  
[muhammadhasbiansyari23@gmail.com](mailto:muhammadhasbiansyari23@gmail.com) <sup>3</sup>, [fitrahmirza@gmail.com](mailto:fitrahmirza@gmail.com) <sup>4</sup>

**Abstract,** *This study encourages the influence of government programs in increasing access to education and job creation in Indonesia during the period 2019 to 2023. Using a mixed method that includes quantitative and qualitative approaches, this study analyzes secondary data and conducts in-depth interviews to understand the social context and community experiences. The results show a significant increase in the number of schools and scholarship programs, which have contributed to increasing graduation rates and reducing dropout rates, especially among students from low-income families. However, challenges such as unequal access to education in remote areas and lack of adequate educational infrastructure still need to be addressed. In addition, there is a positive relationship between education levels and poverty reduction, indicating that better education can increase employment opportunities. Job training programs have also proven to be important in preparing an efficient workforce, but need to be adjusted to the needs of a dynamic labor market. This study emphasizes the need for continuous evaluation of education and job training policies to optimally achieve national development goals and provide real benefits to the wider community.*

**Keywords :** *access to education, job creation, quality improvement, inequality, job training programs.*

**Abstrak,** Penelitian ini mendorong pengaruh program pemerintah dalam meningkatkan akses pendidikan dan penciptaan lapangan kerja di Indonesia selama periode 2019 hingga 2023. Menggunakan metode campuran yang mencakup pendekatan kuantitatif dan kualitatif, penelitian ini menganalisis data sekunder serta melakukan wawancara mendalam untuk memahami konteks sosial dan pengalaman masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam jumlah sekolah dan program beasiswa, yang memberikan kontribusi pada peningkatan tingkat kelulusan dan pengurangan angka putus sekolah, terutama pada kalangan siswa dari keluarga kurang mampu. Namun tantangan seperti ketidakmerataan akses pendidikan di daerah terpencil dan kurangnya infrastruktur pendidikan yang memadai masih perlu diatasi. Selain itu, terdapat hubungan positif antara tingkat pendidikan dan penurunan angka kemiskinan, yang menunjukkan bahwa pendidikan yang lebih baik dapat meningkatkan peluang kerja. Program pelatihan kerja juga terbukti penting dalam mempersiapkan tenaga kerja yang efisien, tetapi perlu disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja yang dinamis. Penelitian ini menekankan perlunya evaluasi berkelanjutan terhadap kebijakan pendidikan dan pelatihan kerja untuk mencapai tujuan pembangunan nasional secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

**Kata Kunci :** akses pendidikan, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas, ketidakmerataan, program pelatihan kerja.

### 1. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi dan pendidikan merupakan dua aspek yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Di Indonesia, program-program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan dan menciptakan lapangan kerja telah menjadi fokus utama dalam upaya mencapai pembangunan berkelanjutan. Pendidikan yang berkualitas tidak hanya berfungsi sebagai alat transfer ilmu, tetapi juga sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan dan karakter individu. Dengan meningkatnya akses pendidikan, diharapkan masyarakat dapat memperoleh pengetahuan yang diperlukan untuk berkontribusi secara positif dalam dunia kerja. Dalam konteks ini, evaluasi terhadap dampak dari program-

program pendidikan menjadi sangat penting untuk memahami sejauh mana kebijakan tersebut berhasil mencapai tujuannya. Melalui evaluasi, kami dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari program-program yang ada, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa depan. Selain itu, penciptaan lapangan kerja juga menjadi perhatian utama pemerintah, terutama dalam menghadapi penurunan intensitas yang tinggi. Program-program pembangunan ekonomi yang diharapkan dapat menciptakan peluang kerja baru yang dapat menyerap tenaga kerja, terutama bagi generasi muda. Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan ini agar dapat mengukur efektivitasnya dan memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi.

Dalam upaya meningkatkan akses pendidikan, pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai inisiatif seperti Program Indonesia Pintar dan beasiswa untuk siswa dari keluarga kurang mampu. Program-program ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan serta antara kelompok sosial ekonomi yang berbeda. Evaluasi terhadap program-program ini sangat penting untuk memastikan bahwa bantuan pendidikan tersebut tepat sasaran dan efektif dalam meningkatkan partisipasi siswa di sekolah. Selain itu, evaluasi juga membantu dalam mengidentifikasi tantangan yang dihadapi siswa dan sekolah dalam proses pembelajaran. Misalnya, kurangnya infrastruktur pendidikan dan kualitas pengajaran yang bervariasi sering kali menjadi kendala bagi siswa untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Dengan melakukan evaluasi secara menyeluruh, pemerintah dapat menemukan solusi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Melalui data dan analisis yang diperoleh dari evaluasi ini, kita dapat memahami lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program pendidikan dan bagaimana hal tersebut berdampak pada peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat.

Penciptaan lapangan kerja merupakan salah satu tujuan utama dari program pembangunan ekonomi pemerintah. Dalam konteks ini, penting untuk mencapai sejauh mana program-program tersebut berhasil menciptakan peluang kerja baru dan mengurangi angka penurunan. Berbagai sektor ekonomi memiliki potensi untuk menyerap tenaga kerja, namun tidak semua sektor mampu memberikan lapangan kerja yang berkualitas. Oleh karena itu, evaluasi harus mencakup analisis sektor-sektor mana yang paling efektif dalam menciptakan lapangan kerja serta jenis keterampilan apa yang dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja. Selain itu, program pelatihan dan pengembangan keterampilan juga perlu dievaluasi agar sesuai dengan kebutuhan industri. Dengan demikian, lulusan pendidikan dapat bersaing di dunia kerja dan memenuhi permintaan pasar. Evaluasi terhadap penciptaan lapangan kerja juga harus

mempertimbangkan faktor-faktor eksternal seperti kondisi ekonomi global dan kebijakan pemerintah lainnya yang dapat mempengaruhi pertumbuhan sektor-sektor tertentu. Dengan pemahaman yang mendalam tentang dinamika pasar tenaga kerja, pemerintah dapat menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam menciptakan lapangan kerja baru.

Kendala dalam pelaksanaan program sering kali muncul di lapangan. Misalnya, kurangnya sarana prasarana pendidikan seperti gedung sekolah yang layak atau akses internet yang memadai dapat menghambat proses belajar mengajar. Selain itu, kualitas guru juga sangat bervariasi, di mana beberapa daerah masih menghadapi kekurangan tenaga pengajar berkualitas. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap faktor-faktor ini agar dapat memberikan rekomendasi perbaikan yang tepat. Dengan pendekatan berbasis bukti dalam evaluasi kebijakan, pemerintah dapat lebih memahami tantangan-tantangan ini dan merumuskan strategi untuk mengatasinya. Misalnya, jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa kurangnya fasilitas pendidikan menjadi kendala utama dalam peningkatan akses pendidikan, maka alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur pendidikan harus menjadi prioritas utama. Dengan demikian, evaluasi tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur keberhasilan tetapi juga sebagai pedoman bagi pengambilan keputusan strategis.

Evaluasi juga harus mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan dari program-program pembangunan tersebut. Pembangunan yang inklusif harus memperhatikan pemerataan hasil agar seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Hal ini termasuk memastikan bahwa kelompok-kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat memiliki akses yang sama terhadap pendidikan dan pekerjaan. Evaluasi dampak program pembangunan perlu dilakukan dengan mempertimbangkan perspektif sosial agar kebijakan yang diambil tidak hanya fokus pada angka-angka ekonomi saja tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan pendekatan ini, diharapkan bahwa semua inisiatif pemerintah akan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mampu menciptakan perubahan positif dalam kehidupan mereka. Diharapkan dapat ditemukan hubungan antara program pemerintah dengan peningkatan akses pendidikan dan penciptaan lapangan kerja. Hasil evaluasi ini akan menjadi dasar bagi pengambilan keputusan dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik di masa depan. Keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi juga akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dari program-program pemerintah. Masyarakat sebagai penerima manfaat mempunyai perspektif unik mengenai keberhasilan atau kegagalan program-program tersebut.

Oleh karena itu, keterlibatan mereka dalam proses evaluasi akan memberikan masukan berharga bagi perbaikan kebijakan ke depan.

Dengan informasi yang diperoleh dari evaluasi tersebut, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini akan memastikan bahwa sumber daya dialokasikan dengan bijaksana dan efektif demi mencapai tujuan pembangunan nasional. Selain itu, evaluasi berkelanjutan terhadap program-program pendidikan dan penciptaan lapangan kerja juga penting untuk menyesuaikan dengan dinamika perubahan sosial dan ekonomi yang terus berlangsung. Melalui pendekatan partisipatif dalam evaluasi kebijakan, pemerintah dapat merumuskan strategi pembangunan yang lebih baik dan lebih inklusif. Oleh karena itu, tujuan akhir dari evaluasi ini adalah untuk memastikan bahwa seluruh inisiatif pemerintah tidak hanya berjalan sesuai rencana tetapi juga memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat secara keseluruhan. Ini bertujuan untuk memberikan pengaruh program pembangunan ekonomi pemerintah dalam peningkatan akses pendidikan dan penciptaan lapangan kerja serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan di masa depan demi tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

## **2. KAJIAN TEORETIS**

Evaluasi program pemerintah dalam peningkatan akses pendidikan dan penciptaan lapangan kerja merupakan aspek penting dalam pengembangan sosial dan ekonomi suatu negara. Pendidikan yang berkualitas berfungsi sebagai landasan untuk menciptakan sumber daya manusia yang kompetitif, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Menurut George dan Caulfield (2022), “integritas akademik adalah fondasi dari kejujuran ilmiah,” yang menunjukkan bahwa pendidikan yang baik harus diimbangi dengan nilai-nilai etika yang kuat. Oleh karena itu, evaluasi terhadap program-program pendidikan perlu dilakukan untuk memastikan bahwa mereka memenuhi tujuan yang ditetapkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat (Sipas, 2024).

Pencipta lapangan kerja juga menjadi fokus utama dalam kebijakan pembangunan ekonomi. Program-program pemerintah yang dirancang untuk menciptakan peluang kerja harus dievaluasi secara berkala untuk menilai efektivitasnya. Evaluasi ini tidak hanya mencakup pengukuran jumlah lapangan kerja yang tercipta, tetapi juga kualitas pekerjaan tersebut. Menurut Deeppublish (2023), evaluasi dampak program harus mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi hasil, seperti kondisi pasar tenaga kerja dan kebijakan ekonomi global. Model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) dapat digunakan sebagai kerangka kerja dalam menyebarkan program-program ini. Model ini

membantu dalam memahami konteks di mana program dilaksanakan serta proses dan produk yang dihasilkan (Penerbit Deepublish, 2023). Dengan pendekatan ini, evaluator dapat memberikan rekomendasi perbaikan berdasarkan analisis data yang komprehensif.

Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi sangat penting untuk memastikan bahwa semua perspektif dipertimbangkan. Pemangku kepentingan mencakup pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah yang terlibat dalam penyusunan dan implementasi kebijakan. Dengan melibatkan mereka dalam evaluasi, informasi yang diperoleh menjadi lebih kaya dan relevan (Liputan6, 2023). Dalam melakukan evaluasi, pendekatan kualitatif dan kuantitatif sering kali digunakan secara bersamaan. Pendekatan kuantitatif meliputi pengumpulan data numerik yang dapat dianalisis secara statistik untuk mengukur kinerja program, sedangkan pendekatan kualitatif fokus pada pemahaman mendalam tentang pengalaman peserta program melalui wawancara atau diskusi kelompok (Gamedia, 2023). Kombinasi kedua pendekatan ini memberikan gambaran yang lebih holistik tentang efektivitas program.

Hasil dari evaluasi tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur keberhasilan tetapi juga sebagai pedoman bagi pengambil keputusan dalam merumuskan kebijakan di masa depan. Rekomendasi kebijakan harus didasarkan pada temuan evaluasi yang obyektif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat (Penerbit Deepublish, 2023). Dengan demikian, evaluasi menjadi sarana penting dalam meningkatkan kualitas kebijakan publik. Kajian teori mengenai evaluasi program menunjukkan bahwa proses ini sangat penting dalam memastikan efektivitas dan efisiensi kebijakan publik. Melalui berbagai model dan pendekatan yang ada, evaluator dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengambil keputusan serta masyarakat luas (Sipas, 2024). Dengan melakukan evaluasi secara sistematis dan partisipatif, diharapkan hasil kebijakan dapat diperbaiki demi tercapainya tujuan pembangunan yang lebih baik di masa mendatang.

Tantangan tetap ada dalam penerapan kebijakan pendidikan. Ketidakmerataan akses pendidikan di berbagai daerah menjadi hambatan bagi tercapainya tujuan pembangunan ekonomi yang inklusif (UNY, 2023). Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan yang lebih strategis untuk memastikan semua lapisan masyarakat mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas. Hubungan antara pendidikan dan pertumbuhan ekonomi merupakan isu kompleks yang membutuhkan pendekatan multidimensi. Evaluasi dan penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami dinamika ini secara lebih mendalam dan untuk merumuskan kebijakan yang efektif dalam meningkatkan akses pendidikan dan mendorong pertumbuhan ekonomi (Kemenkeu, 2024).

### 3. METODE PENELITIAN

Evaluasi pengaruh ekonomi program pembangunan pemerintah dalam peningkatan akses pendidikan dan penciptaan lapangan kerja dapat dibagi menjadi beberapa pendekatan utama. Pertama, pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengukur variabel-variabel yang berkaitan dengan pendidikan dan lapangan kerja, seperti jumlah sekolah, tingkat izin, dan angka kemiskinan. Data kuantitatif ini biasanya dikumpulkan melalui survei, kuesioner, atau data sekunder dari lembaga pemerintah. Analisis statistik kemudian dilakukan untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel-variabel tersebut dan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya.

Selain itu, metode studi kasus dapat digunakan untuk menganalisis implementasi program-program tertentu di lokasi tertentu. Dengan menggunakan studi kasus, peneliti dapat mengeksplorasi secara rinci bagaimana suatu program pendidikan atau pelatihan kerja dijalankan, tantangan yang dihadapi, serta dampaknya terhadap masyarakat setempat. Pendekatan ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang dinamika yang terjadi dalam konteks nyata, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang lebih tepat untuk perbaikan kebijakan di masa mendatang.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

**Tabel 1: Hasil Evaluasi Peningkatan Akses Pendidikan**

Aspek	Deskripsi
<b>Peningkatan Akses Pendidikan</b>	Program pemerintah telah berhasil meningkatkan jumlah sekolah di berbagai jenjang pendidikan dari tahun 2019 hingga 2023. Peningkatan ini mencerminkan upaya untuk memperluas akses pendidikan, terutama bagi anak-anak dari kelompok kurang mampu.
<b>Penambahan Ruang Kelas</b>	Terdapat peningkatan yang signifikan dalam jumlah ruang kelas, yang memungkinkan lebih banyak siswa untuk belajar secara bersamaan.

<b>Penyediaan Fasilitas</b>	Pemerintah telah menyediakan fasilitas dasar seperti toilet, air bersih, dan ruang belajar yang layak di banyak sekolah.
<b>Program Pendidikan Inklusif</b>	Diperkenalkan program pendidikan inklusif untuk mendukung siswa dengan kebutuhan khusus agar dapat mengakses pendidikan yang setara.
<b>Pelatihan Guru</b>	Pelatihan bagi guru untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan metode pembelajaran yang lebih efektif.

Pembahasan Tabel 1

Hasil evaluasi pada Tabel 1 menunjukkan bahwa program pemerintah dalam meningkatkan akses pendidikan telah berhasil menciptakan lebih banyak sekolah di berbagai jenjang pendidikan. Dari tahun 2019 hingga 2023, terdapat penambahan signifikan dalam jumlah ruang kelas yang memungkinkan lebih banyak siswa untuk belajar secara bersamaan. Selain itu, penyediaan fasilitas dasar seperti toilet dan air bersih sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang sehat. Program pendidikan inklusif juga diperkenalkan untuk mendukung siswa dengan kebutuhan khusus agar dapat mengakses pendidikan yang setara dengan teman-teman mereka. Pelatihan bagi guru juga dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan metode pembelajaran yang lebih efektif.

**Tabel 2: Hasil Evaluasi Program Indonesia Pintar**

<b>Aspek</b>	<b>Deskripsi</b>
<b>Program Indonesia Pintar</b>	Program Indonesia Pintar (PIP) menunjukkan peningkatan jumlah penerima setiap tahunnya, memberikan dukungan finansial kepada siswa dari keluarga kurang mampu.
<b>Jenis Bantuan</b>	Bantuan diberikan dalam bentuk tunai untuk biaya pendidikan, alat tulis, dan kebutuhan sekolah lainnya.
<b>Penerima Beasiswa</b>	Jumlah penerima beasiswa meningkat secara signifikan, terutama di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi.

<b>Efektivitas Sosialisasi</b>	Meskipun ada kesulitan dalam program sosialisasi, upaya untuk menjangkau masyarakat melalui informasi kampanye telah dilakukan.
<b>Dampak Jangka Panjang</b>	Program ini diharapkan dapat meningkatkan angka partisipasi pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah di kalangan anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Pembahasan Tabel 2

Tabel 2 menggambarkan keberhasilan Program Indonesia Pintar (PIP) yang terus meningkat jumlah penerimanya setiap tahunnya. Bantuan diberikan dalam bentuk tunai untuk biaya pendidikan, alat tulis, dan kebutuhan sekolah lainnya, sehingga meringankan beban finansial bagi keluarga kurang mampu. Jumlah penerima beasiswa meningkat secara signifikan, terutama di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi, yang menunjukkan dampak positif dari program ini terhadap pemerataan pendidikan. Meskipun terdapat tantangan dalam program sosialisasi, upaya untuk menjangkau masyarakat melalui informasi kampanye telah dilakukan dan diharapkan dapat meningkatkan angka partisipasi pendidikan serta mengurangi angka putus sekolah.

**Tabel 3: Hasil Evaluasi Implementasi Tantangan**

<b>Aspek</b>	<b>Deskripsi</b>
<b>Tantangan Implementasi</b>	Meskipun ada kemajuan, tantangan seperti ketidakmerataan akses pendidikan di daerah terpencil masih ada.
<b>Masalah Infrastruktur</b>	Banyak sekolah di daerah terpencil yang masih kekurangan infrastruktur dasar seperti listrik dan akses internet.
<b>Kualitas Pengajaran</b>	Kualitas pengajaran bervariasi tergantung pada lokasi; beberapa daerah masih menghadapi kekurangan guru berkualitas.
<b>Administrasi Rumit</b>	Proses administrasi untuk mendapatkan bantuan atau beasiswa sering kali rumit dan membingungkan bagi orang tua siswa.

<b>Tanggung Jawab Terhadap Masukan</b>	Kurangnya mekanisme umpan balik yang efektif dari masyarakat mengenai pelaksanaan program-program tersebut.
--	---

### Pembahasan Tabel 3

Tabel 3 menyoroti tantangan implementasi yang masih dihadapi pemerintah meskipun ada kemajuan dalam akses pendidikan dan program beasiswa. Ketidakmerataan akses pendidikan di daerah terpencil menjadi salah satu tantangan utama, di mana banyak sekolah masih kekurangan infrastruktur dasar seperti listrik dan akses internet. Kualitas pengajaran juga bervariasi tergantung pada lokasi; beberapa daerah masih menghadapi kekurangan guru berkualitas. Selain itu, proses administrasi untuk mendapatkan bantuan atau beasiswa sering kali rumit dan membingungkan bagi orang tua siswa, sehingga menghambat partisipasi mereka dalam program tersebut. Kurangnya mekanisme umpan balik yang efektif dari masyarakat mengenai pelaksanaan program-program tersebut juga menjadi kendala yang perlu diperbaiki agar program dapat berjalan lebih baik di masa depan.

Dengan demikian, meskipun terdapat kemajuan yang signifikan dalam peningkatan akses pendidikan dan pelaksanaan program beasiswa, tantangan-tantangan ini perlu ditangani secara serius agar manfaat dari kebijakan pemerintah dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia.

## 5. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa program pemerintah dalam meningkatkan akses pendidikan dan penciptaan lapangan kerja di Indonesia telah memberikan dampak yang signifikan, meskipun masih terdapat tantangan yang perlu diatasi. Peningkatan jumlah sekolah dan program beasiswa bagi siswa dari keluarga kurang mampu telah berhasil memperluas akses pendidikan, yang berkontribusi pada peningkatan tingkat izin dan pengurangan angka putus sekolah. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menciptakan generasi yang terdidik dan siap menghadapi tantangan di masa depan.

Namun, ketidakmerataan akses pendidikan di berbagai daerah, terutama di wilayah terpencil, masih menjadi kendala yang harus diperhatikan. Infrastruktur pendidikan yang tidak memadai dan kurangnya tenaga pengajar berkualitas di beberapa daerah menghambat tercapainya tujuan pendidikan yang merata. Oleh karena itu, evaluasi dan penyesuaian kebijakan pendidikan harus terus dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati manfaat dari program-program tersebut. Dalam hal penciptaan lapangan kerja, data menunjukkan bahwa peningkatan akses pendidikan berkontribusi pada

penurunan tingkat kemiskinan. Program pelatihan kerja yang diselenggarakan pemerintah juga penting untuk mempersiapkan tenaga kerja yang efisien. Namun diperlukan penyesuaian program pelatihan agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja yang terus berubah. Dengan langkah-langkah strategi ini, diharapkan tujuan pembangunan nasional dapat tercapai secara optimal, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

## **REFERENSI**

- Abdulloh, dkk. (2019). *Peningkatan dan Pengembangan Prestasi Belajar Peserta Didik*. Ponorogo : Uwais.
- Abdussamad, Zuchri. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Pers.
- Adi, Nelfia dkk. (2023). *Penyusunan Asesmen Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila pada Kurikulum Merdeka Bagi Guru Sekolah Dasar*. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, Vol. 8, No.3.
- Alfaeni, Dini Kusumadianti Nur. (2022). *Kesiapan Guru Dalam Mengimplementasikan Kurikulum Merdeka Pada Program Penggerak Sekolah*. Skripsi. Bandung: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia.
- Alimuddin, Johar. (2023). *Implementasi Kurikulum Merdeka Di Sekolah Dasar*. *Jurnal Ilmiah Kontekstual*, vol. 4, tidak. 02.
- Amalia, Irma Dwi. (2023). *Implementasi Kurikulum Merdeka Dalam Meningkatkan...* Pustaka.
- Gumilar, Gumgum dkk. (2023). *Urgensi Penggantian Kurikulum 2013 Menjadi Kurikulum Merdeka*. *Jurnal Papeda*, vol. 5, tidak. 2.
- Hartono, Jogiyanto. (2018). *Metode Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*. Yogyakarta: ANDI.
- Haryono, Cosmas Gatot. (2020). *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi*. Sukabumi: CV Jejak.
- Helaludin dan Hengki Wijaya. (2019). *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*. Makassar: Sekolah Tinggi Teologi Jaffray.
- Hermawan, Iwan. (2019). *Metodologi Penelitian Pendidikan (Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed Method)*. Kuningan: Hidayatul Quran Kuningan.
- Jamaludin, Gilang Maulana dkk. (2023). *Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka Di Sekolah Dasar: Tantangan Dan Peluang*. *Jurnal Elementaria Edukasi*, Vol. 6, No.1.
- Ningsih, Ningsih. (2023). *Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar Di UPT SMP Negeri 9 Gresik*. *DIDAKTIKA : Jurnal Pemikiran Pendidikan*, vol. 29, tidak. 1.

Oke, Gde Putu Arya dkk. (2023). Buku Ajar Mata Kuliah Terintegrasi Bahasa Ibu: Perencanaan Pembelajaran AUD. Pekalongan: Nasya Memperluas Manajemen.

Purnawanto, Ahmad Teguh. (2022). Profil Implementasi Pelajar Pancasila dalam Pembelajaran Kurikulum Merdeka. *Jurnal Ilmiah Pedagogi*, Vol. 21, No.1.

Putra, Edo Pramana. (2023). Analisis Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar di SDIT Insan Taqwa Natar Lampung Selatan. Skripsi. Lampung: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Lampung.